

IMPLEMENTATION OF POLICY ON WASTE MANAGEMENT

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Agra Alfin Zulfa¹, Rita Rahmawati^{1*}, Irma Purnamasari¹, Deny Hernawan¹, Cecep Wahyudin¹, Afmi Apriliani¹, Faisal Tri Ramdani¹, Dede Syahrudin¹, Saepudin¹

¹Program Studi Administrasi Publik, Universitas Djuanda, Indonesia

*Korespondensi: Rita Rahmawati. Email: rita.rahmawati@unida.ac.id

(Diterima: 21-Mei-2025; Ditelaah: 20-06-2025; Disetujui: 05-09-2025)

ABSTRACT

Waste management in urban buffer areas such as Ciawi District, Bogor Regency, has become a critical issue due to increasing population growth and the intensification of community activities. To address this challenge, the Bogor Regency Government enacted Regional Regulation Number 2 of 2014 on Waste Management. However, the implementation of this regulation has not been optimal, facing various structural and operational obstacles on the ground. This study evaluates the effectiveness of the policy implementation using George C. Edward III's policy implementation theory, which includes four key dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. A quantitative survey method was employed, utilizing the Weighted Mean Score (WMS) analysis on 16 employees of the Waste Management Technical Implementation Unit (UPT) Region III and 100 residents of Ciawi District. The results show a significant disparity in assessments between implementers and the community. While officials rated disposition and bureaucratic structure very positively, residents perceived disposition as merely good and rated communication and resources relatively low. These findings indicate weaknesses in information dissemination and a lack of adequate facilities and workforce support. Therefore, improving the effectiveness of waste management policy requires enhanced participatory communication, sufficient resource provision, and stronger institutional synergy to achieve efficient and sustainable waste management in the region.

Keywords: Ciawi; Edward III; Public policy; Waste management

ABSTRAK

Pengelolaan sampah di kawasan penyangga perkotaan seperti Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, menjadi isu krusial seiring meningkatnya populasi dan intensitas aktivitas masyarakat. Sebagai upaya penanganan, Pemerintah Kabupaten Bogor mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Sampah. Kendati demikian, pelaksanaan regulasi ini belum berjalan optimal karena masih dihadapkan pada berbagai hambatan struktural dan operasional di lapangan. Penelitian ini mengkaji sejauh mana efektivitas implementasi kebijakan tersebut, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang mencakup empat aspek utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode kuantitatif berbasis survei digunakan dalam studi ini, dengan teknik analisis *Weight Mean Score* (WMS) terhadap 16 pegawai UPT Pengelolaan Sampah Wilayah III dan 100 warga Kecamatan Ciawi sebagai responden. Hasil analisis menunjukkan perbedaan signifikan dalam penilaian antara pelaksana dan masyarakat. Aparat pelaksana menilai dimensi disposisi dan struktur birokrasi sangat positif, sementara warga hanya menganggap disposisi berada pada kategori baik dan menilai aspek komunikasi serta sumber daya cukup rendah. Hal ini mengindikasikan lemahnya penyebaran informasi dan minimnya dukungan fasilitas serta tenaga kerja. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas kebijakan memerlukan perbaikan pada aspek komunikasi yang lebih partisipatif, penyediaan sumber daya yang memadai, serta sinergi antar lembaga demi menciptakan pengelolaan sampah yang berdaya guna dan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Kata kunci: Pengelolaan sampah; Ciawi; Edward III; Kebijakan publik

PENDAHULUAN

Isu pengelolaan sampah terus menjadi salah satu permasalahan strategis yang terus mengalami dinamika, khususnya di wilayah perkotaan dan daerah penyangga seperti Kabupaten Bogor. Peningkatan jumlah penduduk dan kompleksitas aktivitas sosial ekonomi masyarakat turut mendorong peningkatan volume sampah setiap harinya baik sampah organik maupun sampah an organik. Adapun faktor menumpuknya sampah yaitu karna tidak ada pengelolaan sampah yang baik sehingga dapat menyebabkan volume sampah meningkat seperti sampah plastik yang tidak dapat terurai dalam kurun waktu singkat (Wahyudin, et al., 2023).

Penumpukan sampah apabila tidak dikelola secara efektif, sampah dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan, menurunkan kualitas hidup, serta memicu permasalahan kesehatan masyarakat. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah telah merumuskan sejumlah kebijakan normatif, di antaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Di level daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014, yang mencakup aspek pengurangan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga tahap akhir pembuangan sampah. Dengan demikian tata kelola sampah menjadi sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, sehingga untuk mencapai adanya tata kelola sampah yang baik maka diperlukan kolaborasi lintas sektor (Wahyudin, et al., 2023; Wahyudin, et al., 2025).

Kecamatan Ciawi sebagai salah satu wilayah pelayanan UPT Pengelolaan Sampah Wilayah III menghadapi tantangan khusus mengingat padatnya populasi yang melebihi 100 ribu jiwa dan jaraknya yang cukup jauh dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Faktor ini menuntut sistem pengelolaan yang lebih terstruktur dan efisien.

Meski regulasi tersebut telah ditetapkan, pelaksanaannya di tingkat lokal masih menemui sejumlah hambatan. Mengacu pada kerangka teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Di wilayah Kecamatan Ciawi, keempat faktor tersebut menunjukkan adanya tantangan yang signifikan. Di antaranya adalah kurang optimalnya penyebaran informasi dan pemahaman kebijakan di kalangan masyarakat, keterbatasan fasilitas seperti armada pengangkut dan jumlah personel, minimnya semangat atau komitmen dari pelaksana di lapangan, serta lemahnya koordinasi lintas instansi yang seharusnya mendukung efektivitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat berdampak atas permasalahan yang terjadi dalam penanggulangan sampah sehingga pembuat kebijakan di suatu daerah harus memfasilitasi sarana dan prasarana atas regulasi yang dibuat untuk meningkatkan kinerja para pegawainya (Azijah, et al., 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, studi ini bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 di wilayah Kecamatan Ciawi secara komprehensif, serta menyampaikan rekomendasi kontekstual guna mendukung terciptanya sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan.

MATERI DAN METODE

Studi ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan tujuan mendeskripsikan fenomena berdasarkan data numerik yang diperoleh dari responden. Sesuai dengan pendekatan positivistik, metode ini memungkinkan peneliti untuk memotret fenomena sosial melalui pengumpulan dan analisis data numerik guna

menggambarkan atau menguji kecenderungan tertentu (Sugiyono, 2020).

Populasi terdiri dari dua kelompok yang terdiri dari pegawai UPT Pengelolaan Sampah Wilayah III sebanyak 16 orang, dan masyarakat Kecamatan Ciawi dengan jumlah 105.359 jiwa. Pengambilan sampel masyarakat menggunakan rumus Taro Yamane dengan toleransi kesalahan 10%, menghasilkan 100 responden. Adapun pemilihan responden dari kalangan pegawai dilakukan secara acak melalui penerapan metode simple random sampling.

Guna menjamin keakuratan data yang diperoleh dari para responden, penelitian juga menggunakan teknik purposive sampling, khususnya untuk wawancara mendalam kepada masyarakat, petugas lapangan, serta warga yang tinggal di zona padat penduduk.

Instrumen pengumpulan data meliputi:

1. Instrumen kuesioner disusun menggunakan skala Likert lima tingkat guna menilai empat aspek utama dalam implementasi kebijakan, yakni komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi pendukung (Sugiyono, 2020).
2. Observasi langsung untuk mengonfirmasi kesesuaian antara data kuesioner dan kondisi lapangan (Sugiyono, 2020).
3. Wawancara dilakukan terhadap Kepala UPT, petugas lapangan, dan perwakilan masyarakat guna memperoleh informasi kontekstual (Sugiyono, 2020).
4. Studi Pustaka dilakukan dengan menelaah teori dan kebijakan terkait pengelolaan sampah dari berbagai sumber literatur akademik.

Data dianalisis menggunakan metode *Weight Mean Score* (WMS), yang mengkalkulasi nilai rata-rata persepsi responden berdasarkan kategori: sangat baik, baik, cukup baik, tidak baik, dan sangat tidak baik (Sugiyono, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

UPT Pengelolaan Sampah Wilayah III Ciawi merupakan Unit Pelaksana Teknis yang beroperasi berada dalam struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Dalam struktur pemerintahan daerah, Badan Lingkungan Hidup berperan sebagai pelaksana teknis di bidang lingkungan dan berada langsung di bawah koordinasi Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas utama UPT ini adalah mendukung Bupati dalam menjalankan kewenangan daerah, khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas pengelolaan sampah demi mendukung kebersihan dan kesehatan lingkungan masyarakat.

Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan *output* dan *outcomes* bagi masyarakat. Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan (Levitt, 1980).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu (Wachid & Caesar, 2021; Suryani, 2014; Sari, 2016; Yudianto et al., 2021; Cahyadi et al., 2018; Lesmana et al., 2017; Apriliyani et al., 2022; Nerustia et al., 2015; Islami et al., 2020; Pratidina et al., 2022; Hariani et al., 2018; Syafitri et al., 2025; Sahila et al., 2024), pendekatan yang digunakan dalam mengukur Implementasi Kebijakan Perda Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Ciawi menggunakan teori George Edward yang memiliki empat dimensi dalam implementasi kebijakan yaitu (a) Komunikasi (b) Sumber Daya (c) Disposisi (d) Struktur Birokrasi (Levitt, 1980). Adapun hasil dari tanggapan responden terhadap pernyataan atau

indikator dari setiap item Implementasi Kebijakan Perda Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Ciawi yaitu sebagai berikut:

1.1 Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penting dalam menyampaikan ukuran dan tujuan kebijakan kepada para pelaksana secara jelas, konsisten, dan akurat. Tanpa komunikasi yang efektif, pelaksana bisa salah paham atau bingung terhadap kebijakan yang harus dijalankan. Komunikasi yang tidak memadai dapat menyebabkan implementasi tidak berjalan optimal karena pelaksana tidak mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan.

Hasil penelitian tentang komunikasi, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.

No	Item Pertanyaan	Pegawai UPT		Masyarakat	
		Mean	Kriteria Penilaian	Mean	Kriteria Penilaian
1	Ukuran dan Tujuan Kebijakan yang dipakai Oleh Implementor	4,43	Sangat Baik	2,12	Tidak Baik
2	Kejelasan dan Tujuan Kebijakan	4,5	Sangat Baik	2,19	Tidak Baik
3	Komunikasi Terhadap Ukuran dan Tujuan Kebijakan	4,43	Sangat Baik	2,08	Tidak Baik
4	Kejelasan Informasi Terhadap Kebijakan	4,43	Sangat Baik	2,19	Tidak Baik
Jumlah		4,44	Sangat Baik	2,14	Tidak Baik

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Berdasarkan hasil tabel di atas, pegawai UPT Pengelolaan Sampah Wilayah III Ciawi memberikan penilaian rata-rata sebesar 4,44 terhadap dimensi komunikasi, yang dikategorikan "Sangat Baik". Sebaliknya, masyarakat Kecamatan Ciawi hanya memberikan skor rata-rata 2,14, yang masuk dalam kategori "Tidak Baik".

Kondisi ini menggambarkan bahwa implementasi kebijakan pada dimensi komunikasi belum dikatakan baik, karena masih kurangnya komunikasi terhadap pihak masyarakat dengan hal tersebut maka perlu ditingkatkan kembali agar komunikasi terhadap masyarakat menjadi lebih baik.

1.2 Sumber Daya

Sumber daya mencakup SDM (jumlah dan kemampuan), informasi, kewenangan, dana, serta sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Meski komunikasi baik, tanpa sumber daya yang memadai program tetap gagal. Kurangnya tenaga ahli, informasi yang tidak lengkap, serta fasilitas dan kewenangan yang terbatas akan menghambat keberhasilan implementasi. Hasil penelitian tentang sumberdaya, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2.

No	Item Pertanyaan	Pegawai UPT		Masyarakat	
		Mean	Kriteria Penilaian	Mean	Kriteria Penilaian
1	Kuantitas Jumlah Staf Pelaksana	4,5	Sangat Baik	3,46	Baik
2	Keahlian Staf Pelaksana	4,43	Sangat Baik	3,29	Cukup Baik
3	Relevansi Informasi	4,43	Sangat Baik	2,3	Tidak Baik
4	Fasilitas Pendukung atau Sarana Prasarana	4,25	Sangat Baik	2,12	Tidak Baik
5	Dana	4,18	Baik	2,34	Tidak Baik
Jumlah		4,35	Sangat Baik	2,70	Cukup Baik

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Merujuk pada data dalam tabel, rata-rata skor Dimensi Sumber Daya dari responden Pegawai UPT Pengelolaan Sampah Wilayah III Ciawi yang mencakup lima indikator tercatat sebesar 4,35, yang diklasifikasikan dalam kategori "Sangat Baik". Sementara itu, responden dari masyarakat Kecamatan Ciawi menunjukkan

rata-rata skor sebesar 2,70 dengan kategori “Cukup Baik” pada dimensi yang sama. Temuan ini mencerminkan bahwa pelaksanaan kebijakan dalam aspek sumber daya telah berjalan dengan baik di kalangan internal organisasi. Namun demikian, untuk mencapai efektivitas yang lebih optimal, masih diperlukan upaya peningkatan, terutama dalam konteks pemenuhan dan penyebaran sumber daya yang merata hingga ke tingkat masyarakat.

1.3 Disposisi

Disposisi adalah sikap dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan. Bila pelaksana menerima dan mendukung kebijakan, maka mereka akan menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Namun jika mereka menolak atau tidak sepaham, implementasi akan terganggu. Dukungan pimpinan, penempatan orang yang tepat, dan pemberian insentif berperan penting dalam membentuk sikap positif pelaksana.

Hasil penelitian tentang disposisi, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3.

No	Item Pertanyaan	Pegawai UPT		Masyarakat	
		Mean	Kriteria Penilaian	Mean	Kriteria Penilaian
1	Sikap Implementor Terhadap Proses Implementasi	4,43	Sangat Baik	3,93	Baik
2	Kesadaran Pelaksana	4,62	Sangat Baik	3,85	Cukup Baik
3	Petunjuk atau Arah Pelaksana Dalam Merespon Program	4,37	Sangat Baik	2,34	Tidak Baik
4	Intensitas Respon atau Komitmen	4,43	Sangat Baik	3,85	Tidak Baik
	Jumlah	4,46	Sangat Baik	3,49	Baik

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel, nilai rata-rata untuk Dimensi Disposisi yang diperoleh dari responden

Pegawai UPT Pengelolaan Sampah Wilayah III Ciawi berdasarkan empat indikator mencapai 4,46 dan tergolong dalam kategori “Sangat Baik”. Sementara itu, responden dari masyarakat Kecamatan Ciawi menunjukkan rata-rata skor sebesar 3,49, yang diklasifikasikan dalam kategori “Baik”. Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan pada dimensi disposisi telah berjalan cukup efektif. Namun demikian, untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan, diperlukan penguatan lebih lanjut dalam aspek disposisi, khususnya dalam memastikan konsistensi dan keselarasan antara pelaksana kebijakan dan persepsi masyarakat.

1.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mencakup pola hubungan, aturan, dan prosedur yang ada dalam lembaga pelaksana. Struktur yang terlalu kaku, tidak sinkron, atau tidak efisien akan menghambat jalannya kebijakan. Sebaliknya, struktur birokrasi yang jelas dan mendukung akan mempermudah koordinasi serta mempercepat proses implementasi kebijakan.

Hasil penelitian tentang struktur birokrasi, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4.

No	Item Pertanyaan	Pegawai UPT		Masyarakat	
		Mean	Kriteria Penilaian	Mean	Kriteria Penilaian
1	Norma-norma yang ada Dalam Organisasi	4,5	Sangat Baik	3,49	Baik
2	Pola Hubungan yang Terjadi Dalam Organisasi	4,43	Sangat Baik	3,47	Baik
	Jumlah	4,46	Sangat Baik	3,48	Baik

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Hasil pengolahan data dalam tabel menunjukkan bahwa rata-rata skor Dimensi Struktur Birokrasi dari responden Pegawai

UPT Pengelolaan Sampah Wilayah III Ciawi, berdasarkan dua indikator, mencapai angka 4,46 yang masuk dalam kategori “Sangat Baik”. Sementara itu, masyarakat Kecamatan Ciawi memberikan rata-rata penilaian sebesar 3,48 untuk dimensi yang sama, yang tergolong dalam kategori “Baik”. Perbedaan ini mencerminkan bahwa implementasi kebijakan dari aspek struktur birokrasi telah berlangsung cukup efektif. Meski demikian, untuk mencapai tingkat efektivitas yang lebih tinggi, diperlukan optimalisasi lebih lanjut terhadap struktur dan mekanisme birokrasi, terutama dalam upaya meningkatkan persepsi dan partisipasi masyarakat.

2. Pembahasan

2.1 Implementasi Kebijakan

Hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5.

Dimensi	Indikator	Pegawai UPT		Masyarakat	
		Mean	Kriteria	Mean	Kriteria
Komunikasi	Ukuran dan Tujuan Kebijakan yang dipakai	4,43	Sangat Baik	2,12	Tidak Baik
	Kejelasan dan Tujuan Kebijakan	4,5	Sangat Baik	2,19	Tidak Baik
	Komunikasi Terhadap Ukuran dan Tujuan Kebijakan	4,43	Sangat Baik	2,08	Tidak Baik
	Kejelasan Informasi Terhadap Kebijakan	4,43	Sangat Baik	2,19	Tidak Baik
Rata-Rata		4,44	Sangat Baik	2,14	Tidak Baik
Sumber Daya	Kuantitas Jumlah Staf Pelaksana	4,5	Sangat Baik	3,46	Baik
	Keahlian Pelaksana	4,43	Sangat Baik	3,29	Cukup Baik
	Relevansi Informasi	4,43	Sangat Baik	2,3	Tidak Baik
	Fasilitas Pendukung	4,25	Sangat Baik	2,12	Tidak Baik
	Dana	4,18	Baik	2,34	Tidak Baik
Rata-Rata		4,35	Sangat Baik	2,70	Cukup Baik
Disposisi	Sikap Implementor	4,43	Sangat Baik	3,93	Baik

Terhadap Proses Implementasi					
Kesadaran Pelaksana	4,62	Sangat Baik	3,85	Cukup Baik	
Arah Pelaksana Dalam Merespon Program	4,37	Sangat Baik	2,34	Tidak Baik	
Intensitas Respon atau Komitmen	4,43	Sangat Baik	3,85	Tidak Baik	
Rata-Rata		4,46	Sangat Baik	3,49	Baik
Struktur Birokrasi	Norma yang ada Dalam Organisasi	4,5	Sangat Baik	3,49	Baik
	Pola Hubungan yang Terjadi Dalam Organisasi	4,43	Sangat Baik	3,47	Baik
Rata-Rata		4,46	Sangat Baik	3,48	Baik
Total Rata-Rata		4,42	Sangat Baik	2,95	Cukup Baik

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Berdasarkan temuan penelitian terkait Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Sampah di Kecamatan Ciawi, pelaksanaan kebijakan tersebut dinilai berada pada kategori “Sangat Baik” oleh responden dari Pegawai UPT Pengelolaan Sampah Wilayah III Ciawi, dengan skor rata-rata 4,42. Sementara itu, responden dari masyarakat Kecamatan Ciawi memberikan penilaian dalam kategori “Baik” dengan skor rata-rata 2,95. Analisis terhadap variabel implementasi kebijakan yang mencakup empat dimensi menunjukkan adanya variasi tingkat efektivitas, di mana terdapat dimensi dengan skor tertinggi dan dimensi lain dengan skor terendah, yang mencerminkan perbedaan capaian dalam setiap aspek pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil rekapitulasi, terdapat dua dimensi Disposisi dan Struktur Birokrasi menempati posisi tertinggi dalam penilaian responden Pegawai UPT Pengelolaan Sampah Wilayah III Ciawi, Rata-rata skor yang diperoleh mencapai

4,46, yang termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. Di sisi lain, masyarakat dari Kecamatan Ciawi memberikan penilaian tertinggi pada aspek Disposisi, dengan rata-rata skor sebesar 3,49, yang diklasifikasikan dalam kategori “Baik”. Pada dimensi tersebut, terdapat dua indikator yang memperoleh hasil sangat baik. Diperkuat juga oleh hasil wawancara dengan pegawai UPT III Ciawi dan masyarakat yang menyatakan bahwa aspek Disposisi, struktur birokrasi telah diimplementasikan telah dilakukan dengan baik.

Berdasarkan analisis rata-rata skor implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Ciawi, dimensi dengan nilai terendah menurut responden Pegawai UPT Pengelolaan Sampah Wilayah III Ciawi adalah dimensi Sumber Daya, Dengan perolehan rata-rata nilai sebesar 4,35, hasil tersebut masih termasuk dalam klasifikasi “Sangat Baik Sementara itu, dari sudut pandang responden masyarakat Ciawi, dimensi Sumber Daya memperoleh skor terendah sebesar 2,14, yang termasuk dalam kategori “Tidak Baik”. Wawancara yang dilakukan dengan pegawai maupun masyarakat mengindikasikan adanya hambatan dalam komunikasi yang efektif antara pihak pengelola dan masyarakat, sehingga informasi terkait pengelolaan sampah tidak tersampaikan secara menyeluruh. Selain itu, keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana juga turut menjadi kendala dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah secara optimal. Oleh karena itu, sarana dan prasarana menjadi faktor krusial dalam keberhasilan suatu program (Wahyudin, 2022).

Secara keseluruhan, rekapitulasi dari keempat dimensi yang dianalisis melalui sejumlah indikator menunjukkan

bahwa implementasi kebijakan ini memperoleh skor rata-rata sebesar 4,42 dari pegawai UPT, yang dikategorikan sebagai “Sangat Baik”, dan skor 2,95 dari masyarakat, yang masuk dalam kategori “Baik”.

Perbedaan persepsi ini penting untuk ditindaklanjuti karena mengindikasikan bahwa kebijakan pelaksanaan sudah cukup baik dari segi internal, namun belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara pelaksana dan warga harus diperkuat agar kebijakan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga berdampak nyata di tingkat lokal. Dalam artian sinergitas antara pengelola dengan masyarakat belum sepenuhnya terjalin dengan optimal sehingga dibutuhkan penguatan sinergitas kepada setiap pihak yang terlibat, dengan adanya sinergitas maka dapat menyelesaikan permasalahan yang tumpang tindih (Maulana, 2019).

Penelitian mengenai implementasi Perda Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Ciawi menunjukkan bahwa kebijakan telah dilaksanakan secara efektif, dengan penilaian “Sangat Baik” dari pegawai UPT Pengelolaan Sampah III Ciawi (skor 4,42) dan “Cukup Baik” dari masyarakat (skor 2,95). Perbedaan ini mencerminkan adanya kesenjangan persepsi, terutama pada aspek komunikasi dan keterbatasan fasilitas. Dimensi disposisi dan struktur birokrasi menjadi yang paling menonjol keberhasilannya.

Jika dibandingkan dengan penelitian di Kabupaten Bengkulu Selatan, pelaksanaan kebijakan di wilayah tersebut belum optimal karena menghadapi hambatan di seluruh dimensi teori Edwards III, termasuk komunikasi, sumber daya,

disposisi, dan struktur birokrasi. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan di Kecamatan Ciawi lebih terorganisir dan menunjukkan komitmen yang kuat dari pelaksana, meskipun masih perlu perbaikan dalam penyebaran informasi dan pemenuhan fasilitas (Wachid & Caesar, 2021).

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Sampah di wilayah Kecamatan Ciawi telah berlangsung dengan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Dari sisi pelaksana, yaitu pegawai UPT Pengelolaan Sampah Wilayah III Ciawi, kebijakan pelaksanaan dinilai sangat baik, terutama dalam aspek disposisi dan struktur birokrasi. Namun persepsi masyarakat masih cenderung rendah, khususnya dalam dimensi komunikasi dan ketersediaan sumber daya.

Selain itu, disposisi pelaksana kebijakan yang belum sepenuhnya didukung oleh sistem penghargaan, serta struktur birokrasi yang kurang terkoordinasi, menjadi penghambat dalam proses implementasi di lapangan. Padahal, pengelolaan sampah yang baik menuntut keterlibatan berbagai pihak secara terpadu, mulai dari perencanaan hingga pengangkutan dan pengolahan akhir.

Meskipun demikian, UPT Pengelolaan Sampah III Ciawi telah melakukan beberapa upaya seperti briefing mingguan, koordinasi dengan pemerintah desa, dan pengangkutan sampah terjadwal. Namun, langkah-langkah tersebut masih perlu ditingkatkan agar lebih partisipatif, komunikatif, dan responsif terhadap

kebutuhan masyarakat serta dinamika wilayah.

Penelitian ini memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menyusun strategi kebijakan pengelolaan sampah yang lebih tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliyani, N. V., Hernawan, D., Purnamasari, I., Goris Seran, G., & Sastrawan, B. (2022). Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *Jurnal Governansi*, 8(1), 11–18. <https://doi.org/10.30997/jgs.v8i1.5045>
- Azizah, S. N., Rahmawati, R., Wahyudin, C., & Lydon, N. A. (2024). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai. *Jurnal Governansi*, 10(1), 1–14.
- Cahyadi, A., Siati, & Fatih, A. Al. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Di Kabupaten Purbalingga. *Demography Journal of Sriwijaya*, 2(2), 25–35.
- Hariani, F., Hernawan, D., & Purnamasari, I. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENKUMHAM NOMOR 27. TAHUN 2014 DALAM MENANGGULANGI PERMASALAHAN KEBERADAAN IMIGRAN (Studi Deskriptif di Kecamatan. Cisarua Kabupaten. Bogor). *Jurnal Governansi*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.30997/jgs.v4i1.1134>
- Islami, S. S., Purnamasari, I., Seran, G. G., Tol, J., No, C., & Pos, K. (2020). Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Bogor Kantong Plastik Di Kota Bogor Policy Implementation of Bogor Mayor Regulation No . 61 / 2018 Regarding Reduction of Using Plastic Bags in Bogor City. *Jurnal GOVERNANSI*, 6(1), 1–8.

- Lesmana, W., Rahmawati, R., & Seran, M. Y. (2017). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 Dalam Penataan Minimarket. *Jurnal Governansi*, 3(1), 1-12.
<https://doi.org/10.30997/jgs.v3i1.808>
- Levitt, R. (1980). *Implementing Public Policy*.
- Nerustia, A. N., Rahmawati, R., & Hernawan, D. (2015). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tata Ruang Wilayah Konservasi Dan Pariwisata Management Policy Implementation of Spatial Region Conservation and Tourism. *Jl. Tol Ciawi Presidential Regulation Number*, 1(54), 2442-3971.
<https://unida.ac.id/ojs/index.php/JGS/article/viewFile/295/50>
- Maulana, S. (2019). Sinergitas pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pemberdayaan usaha kecil untuk mewujudkan pembangunan nasional. Diakses pada, 2.
- Pratidina, G., Rahmawati, R., Hermawan, & Wahyudin, C. (2022). Implementation of Zakat, Infak, and Sedekah Policy Program By Forum Zis. *Jurnal Sosial Humaniora*, 13(2), 154-162.
- Sahila, A. N., Purnamasari, I., Hernawan, D., Apriliani, A., Apriliani, N. V., Ramdani, F. T., & Wahyudin, C. (2024). *Implementasi Kebijakan Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024*. 3, 11506-11512.
- Sari, P. N. (2016). ANALISIS PENGELOLAAN SAMPAH PADAT DI KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 22(5), 573-579.
- Sugiyono, P. D. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Suryani, A. S. (2014). Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang). *Aspirasi*, 5(1), 71-84.
<https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/447/344>
- Syafitri, R. A., Rahmawati, R., Apriliani, A., Husein, M., Maruapey, Saepudin, & Hernawan, D. (2025). *Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Bogor tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Kabupaten Bogor*. 4, 1-12.
- Wachid, A., & Caesar, D. L. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan. *J-KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(2), 173.
<https://doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2.1880>
- Wahyudin, C. (2022). Implementation Of Online Annual Motor Vehicle Tax Payment Services In The Cibadak Samsat Area, Sukabumi Regency. *Journal of Multidisciplinary Science*, 1(2), 64-70.
- Wahyudin, C., Subagdja, O., & Iskandar, A. (2023). Desain model collaborative governance dalam penanganan pengurangan penggunaan plastik. *Jurnal Governansi*, 9(2), 151-162.
- Wahyudin, C. E. C. E. P., Apriliani, A. F. M. I., Ramdani, F. T., Pratidina, G. I. N. U. N. G., & Seran, G. G. (2023). A bibliometric analysis collaborative governance of plastic reduction through the transformation industry. *Journal of Engineering Science and Technology*, 18(4), 85-93.
- Wahyudin, C. E. C. E. P., Apriliyani, N. V., Hasbiyah, D. E. S. I., Pratidina, G. I. N. U. N. G., Rahmawati, R. I. T. A., Purnamasari, I. R. M. A., ... & Pamuncak, M. B. (2025). Production of cassava into plastic bags with a collaborative governance perspective to support sustainable development goals (SDGs): Technology and cost analysis. *Journal of Engineering Science and Technology*, 20(1), 49-56.
- Yudianto, T., Setyono, P., & Handayani, I. G. A. K. R. (2021). Implementasi Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora. *Jurnal*

Kesehatan Lingkungan Indonesia,
20(1), 21-26.
<https://doi.org/10.14710/jkli.20.1.21-26>